



**LURAH SRIHARDONO**  
**KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SRIHARDONO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) Sebagaimana Telah Diubah Yang Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611)

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan ( Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Bantul nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2022 Nomor 20);
14. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Srihardono No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Srihardono (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 12).
18. Peraturan Kalurahan Srihardono Srihardono Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 5 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO

dan

LURAH SRIHARDONO

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | Rp 374.190.662   |
| b. Transfer                  | Rp 4.172.475.400 |
| c. Pendapatan Lain-lain      | Rp 9.926.856     |

Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp 4.556.592,918
2. Belanja Desa	
a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan	Rp 1.995.178.379,56
b. Bidang pelaksanaan pembangunan	Rp 1.451.715.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 192.022.502
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 287.472.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak	Rp 622.800.000
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp 4.549.187.881,56
Surplus/Defisit	Rp 7.405.036,44
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 404.022.183
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp 399.022.183
4. Silpa	Rp 406.427.219,44

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan realisasi kegiatan periode 1 anuari-31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III : Daftar Program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Srihardono.

Ditetapkan di Srihardono  
Pada tanggal 21 Februari 2023  
LURAH SRIHARDONO

ttd.

AWALUDIN

Diundangkan di : Srihardono  
Pada tanggal : 21 Februari 2023  
Carik Srihardono

ttd.

KHOZIMATUL LUTHFIAH

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2023 NOMOR 01

Nomor Register Peraturan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ( 02 Srihardono/2023 )



LAMPIRAN I  
PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Laporan Realisasi APBKal

II. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Informasi Umum

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsialiasi Silpa dan Kas
2. Pendapatan Asli Kalurahan
3. Dana Desa
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
5. Alokasi Dana Desa
6. Bantuan Keuangan Kabupaten
7. Pendapatan lain-lain
8. Belanja:
  - Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
  - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
  - Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
  - Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan
  - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak
  - Belanja Dalam Klasifikasi Ekonomi
  - Belanja Kalurahan dalam Kalsifikasi Sub Bidang
  - Pembiayaan
  - Aset Kalurahan
  - Penyertaan Modal Kalurahan
  - Rekonsiliasi Rekening Koran dan Buku Kas Umum

III. Lampiran – lampiran

1. Lampiran Aset Tanah
2. Lampiran Aset Tetap Lainnya
3. Daftar Realisasi Pembangunan Fisik
4. Program Sektorial Yang Masuk Ke Kalurahan

5. Laporan Realisasi Per Sumber Dana